

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah kasus tindak pidana narkoba di Kota Binjai yang sangat tinggi. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah social yang mengkhawatirkan dan menuntut solusi yang tepat. Permasalahan yang terjadi di wilayah Kota Binjai ini adalah semakin banyaknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di setiap desa dimana yang terlibat didalamnya anak remaja. Kota binjai, sebagai salah satu kota yang dikhawatirkan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, penting untuk dikaji bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan remja di Kota ini. Pertanyaan utama dalam studi ini adalah mengapa implementasi PERDA Nomor 1 Tahun 2019 belum terlaksana dengan maksimal. Padahal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Penggunaan Zat Adiktif lainnya Bab 3 pasal 10 ayat 4 menjelaskan bahwa Melaporkan dan berkoordinasi dengan Badan dan Aparat Kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pembahasan pada penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Di Kota Binjai. Data diperoleh dari sumber primer seperti instansi pemerintahan yang terkait, tokoh masyarakat, akademisi, dan masyarakat yang bergerak dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan laporan. Hasil penelitian ini diketahui masih belum terlaksana dengan maksimal pelaksanaan kebijakan yang di lakukan oleh Polres Kota Binjai. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya manusia yang berkualitas maupun sumberdaya materil yang kurang dalam menunjang pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan aktor juga penting dalam pelaksaan kebijakan ini dimana penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks dan meluas yang memerlukan kerjasama antar sektor dan disiplin.

Kata kunci :Implementasi kebijakan, pemerintah, pencegahan penyalahgunaan narkoba, remaja

## **ABSTRACT ABSTRAK**

*This research is motivated by the very high number of narcotics crime cases in Binjai City. Drug abuse is a worrying social problem and demands the right solution. The problem that occurs in the Binjai City area is the increasing number of narcotics circulation and abuse in every village where teenagers are involved. Binjai City, as one of the cities that is worried about the problem of drug abuse, it is important to study how the implementation of government policies in preventing drug abuse among women in this city. The main question in this study is why the implementation of PERDA Number 1 of 2019 has not been carried out optimally. In fact, based on North Sumatra Provincial Regulation Number 1 of 2019 concerning Facilitation of the Prevention of Abuse of Narcotics, Psychotropics, and the Use of Other Addictive Substances, Chapter 3 article 10 paragraph 4 explains that Report and coordinate with local Police Agencies and Officers if they know of the abuse of narcotics, psychotropics and other addictive substances. In this study using a qualitative descriptive method, the discussion in this study is directed to find out how the Government's policy in preventing drug abuse among adolescents in Binjai City. Data was obtained from primary sources such as relevant government agencies, community leaders, academics, and the community engaged in the prevention of drug abuse. Secondary data is obtained from documentation and reports. The results of this research are known to have not been implemented with the maximum implementation of the policies carried out by the Binjai City Police. This can be seen from the lack of resources owned, both quality human resources and material resources that are lacking in supporting the implementation of activities. Actor involvement is also important in the implementation of this policy where drug abuse is a complex and widespread problem that requires intersectoral and disciplinary cooperation.*

*Keywords : Policy implementation, government, drug abuse prevention, youth*